

Tata Kelola Perusahaan Dan Pengungkapan Sukarela

Irza Shara Hervina¹, Riska Forma Madania², Herry Subagyo³

¹Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 April 2022

Received in revised form 2 Mei 2022

Accepted 10 Juni 2022

Available online Juli 2022

ABSTRACT

This study examines the correlation between corporate governance and voluntary disclosure of information. The sample used was companies that conducted an IPO on the Indonesia Stock Exchange in 2018. Using purposive sampling technique, 129 data were obtained. The analytical tool used was multiple regression analysis with SPSS version 25. The study found that the number of board of directors influenced voluntary disclosure of information, while foreign ownership, institutional ownership, management ownership, public share ownership, independent commissioners, and audit committees were not found to influence voluntary disclosure.

Keywords : GCG, . voluntary disclosure, foreign ownership, institutional ownership

1. PENDAHULUAN

Laporan tahunan memiliki peranan penting sebagai sarana yang vital untuk mengomunikasikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, terutama para investor. Oleh karena itu, laporan tahunan harus mengandung informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan berdasarkan fakta. Hal ini sangat penting bagi para investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan [1]. Mengingat bahwa jumlah investor di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020, peningkatan tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas informasi mengenai kondisi perusahaan yang disampaikan dalam laporan tahunan [2]

Kurangnya transparansi dan adanya manipulasi data keuangan dalam penyampaian informasi sering kali menjadi permasalahan dalam laporan perusahaan. Manipulasi tersebut bisa terjadi karena adanya tata kelola perusahaan yang tidak baik [1]. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat memberikan kesempatan bagi dewan direksi dan komisaris untuk mengambil keuntungan pribadi. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan penyajian informasi tambahan dalam laporan perusahaan [3].

Informasi tambahan yang disampaikan secara sukarela dalam laporan perusahaan tidak diatur oleh aturan khusus dan biasanya tidak ada paksaan dari institusi atau pihak berwenang. Aturan yang diwajibkan pada setiap perusahaan hanya mengatur pengungkapan yang wajib dilakukan (mandatory disclosure), yaitu pengungkapan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang [4]. Namun, pengungkapan yang wajib saja tidak selalu cukup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan para investor [5]. Oleh karena itu, diperlukan informasi tambahan yang lebih transparan, terutama mengenai strategi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam laporan perusahaan. Pengungkapan informasi tambahan dalam laporan perusahaan dilakukan secara sukarela dan tidak diatur oleh aturan khusus atau ditekan oleh institusi atau pihak berwenang. Pengungkapan yang diwajibkan hanya mencakup pengungkapan yang sudah ditetapkan oleh lembaga berwenang [4]. Namun, pengungkapan yang diwajibkan saja tidak selalu memadai dan tidak dapat

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Accepted Juni 22, 2022

memenuhi kebutuhan para investor [5]. Oleh karena itu, diperlukan pengungkapan informasi tambahan yang lebih transparan mengenai strategi dan kinerja perusahaan secara komprehensif dalam laporan perusahaan. Tata kelola yang efektif memungkinkan investor, sebagai perwakilan pemilik, untuk mengendalikan manajer dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan. Studi empiris yang mengaitkan GCG (Good Corporate Governance) dengan pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menggunakan proksi kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah [6], menggunakan Dewan Komisaris [7]; Menggunakan kepemilikan manajemen [8]; menggunakan ukuran dewan direksi, komite audit [9]; dan menggunakan proksi komposisi dewan direksi, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan [10].

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai tata kelola perusahaan, namun hasil-hasilnya belum konsisten terkait dengan penggunaan proksi dan temuannya. Beberapa penelitian seperti [11,12,13,14, dan 15] menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela. Namun, penelitian lain [16,17,18,19,20,21,22, dan 23] menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian para peneliti sebelumnya dengan menambahkan satu variabel independen, yaitu kepemilikan publik. Selain itu, penggunaan indikator pengungkapan sukarela dalam penelitian ini mencakup 33 indikator.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.

Tata kelola perusahaan merujuk pada serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, yang mempengaruhi bagaimana perusahaan diarahkan, dikelola, atau dikendalikan [24]. Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan metode pengelolaan yang mempertimbangkan keuntungan jangka panjang perusahaan bagi para investor [25]. Tata kelola perusahaan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Dengan tata kelola yang baik, kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan dapat diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan bahwa tata kelola yang baik terkait dengan transparansi dan perlakuan adil terhadap investor, melibatkan kepemilikan institusi, dewan direksi, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela.

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga. Jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan. Selain itu, pemegang saham institusi memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mengambil tindakan korektif terhadap keputusan perusahaan, termasuk kebutuhan informasi pemegang saham [19; 22]. Pengungkapan informasi yang luas akan memberikan tambahan sumber informasi bagi pemegang saham. Bukti empiris tentang hubungan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh [17;18;19], dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan hubungan tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.2. Kepemilikan Asing dan Pengungkapan sukarela.

Kepemilikan asing merupakan saham yang dimiliki oleh pemegang saham orang asing, seperti telah kita ketahui bahwa setiap negara mempunyai aturan yang budaya dan bahasa berbeda, hal ini seringkali menyebabkan kesenjangan dalam penyampaian informasi sehingga menuntut perlunya informasi yang lebih luas [26]. Selain itu, investor asing memandang investasi ini sebagai investasi yang lebih berisiko, untuk mengurangi hal tersebut dibutuhkan informasi yang lebih luas, dengan informasi tersebut memungkinkan untuk mengendalikan risiko [22]. Beberapa bukti empirik keterkaitan kepemilikan asing dengan pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya [27; 12; 19; 22]. Berdasarkan penjelasan tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.3. Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.

Kepemilikan manajerial mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, seperti saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Sebagai pemilik sekaligus manajer, mereka cenderung secara sukarela mengungkapkan informasi secara terbuka dan luas untuk mendapatkan penilaian positif dari publik [22]. Dalam konteks teori agensi, kepemilikan manajerial dapat menghasilkan kesejajaran kepentingan antara

pemilik dan manajemen karena memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dapat memotivasi manajer untuk menjalankan praktik manajemen perusahaan yang lebih baik [20]. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh [18,22]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.4. Kepemilikan Publik dan Pengungkapan Sukarela.

Kepemilikan publik mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh investor publik, dimana pemegang saham publik membutuhkan informasi yang komprehensif tentang perusahaan sebagai dasar bagi keputusan investasi mereka, dan juga melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan [27]. Semakin besar proporsi kepemilikan publik, semakin besar potensi untuk mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh investor [28]. Fenomena ini dapat mendorong peningkatan pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Bukti empiris mengenai hubungan antara kepemilikan publik dan pengungkapan menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela [29,30]. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.5. Ukuran Dewan Direksi dan Pengungkapan sukarela.

Dewan direksi merupakan komponen yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan, dimana dewan ini memainkan peran kunci dalam pengelolaan perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan direksi, semakin beragam keahlian yang dapat dimiliki oleh dewan tersebut untuk menjalankan berbagai fungsi dalam organisasi, termasuk menyediakan informasi kepada pemegang saham [31], termasuk keahlian dalam menyusun laporan keuangan [32]. Bukti empiris telah menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan sukarela [33,34]. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

H5: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.6. Komisaris Independen dan Pengungkapan sukarela

Dewan Komisaris merupakan komponen kunci dalam tata kelola perusahaan yang berperan sebagai pengawas dan penasehat bagi direksi dalam pengambilan keputusan. Komposisi dewan komisaris umumnya mencerminkan representasi dari pemegang saham, serta perwakilan dari eksternal yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang biasa dikenal sebagai komisaris independen. Komisaris independen ini tidak memiliki afiliasi dengan pihak internal perusahaan [20]. Keberadaan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk dalam pengungkapan informasi kepada investor. Selain itu, komisaris independen juga dapat memberikan pertimbangan dan saran berdasarkan pengalaman, keahlian, dan jaringan yang dimilikinya [5]. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat tekanan untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada investor [18,35]. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

H6: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.7. Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela

Komite audit merupakan personal yang bertugas untuk meyakinkan publik tentang objektivitas laporan perusahaan, sehingga dapat menambah kepercayaan akan pengendalian internal yang lebih baik [22]. Kualitas laporan perusahaan ini sangat ditentukan oleh komite audit. Dengan demikian, banyak komite audit dapat meningkatkan persepsi positif terkait dengan pengalaman dan keterampilan untuk menjamin pengendalian yang lebih baik khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan [1]. Keberadaan komite audit yang memahami akuntansi memungkinkan untuk menyampaikan informasi secara sukarela karena keberadaan komite audit yang memahami akuntansi berkenaan memberikan masukan dalam mengungkapkan informasi yang lebih transparan guna mengurangi adanya asimetri informasi. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan komite audit menunjukkan adanya peran komite audit terhadap pengungkapan sukarela [5,32]. Berdasarkan pada penjelasan tersebut diajukan hipotesis 7 sebagai berikut:

H7 = Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan enam variabel independen sebagai indikator dari tata kelola perusahaan, yaitu: Kepemilikan Asing (FRG), Kepemilikan Institusional (IST), Kepemilikan Manajerial (MNG),

JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS, Vol.16, No.1, Juli 2022, pp. 216-224

Kepemilikan Publik (PUB), Ukuran Dewan Direksi (BOARD), dan Komisaris Independen (IND), Ukuran perusahaan (SZ) sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Sukarela (VOL). Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018, dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 129 data.

3.1. Definisi Operasional.

Tabel II Definisi Operasional

No	Variable	Difinisi operasional	Pengukuran
1	Pengungkapan Sukarela (VOL)	Pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi	<i>33 scoring indeks disclosure SK Bapepam No-Kep-06/BL/2006</i>
2	Kepemilikan Asing. (FRG)	Besarnya proporsi saham yang dimiliki perusahaan asing	<i>Jumlah saham yang dimiliki asing</i>
3	Kepemilikan Institusional (INS)	Besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh institusi	<i>Jumlah saham yang dimiliki asing</i>
4	Kepemilikan Manajerial (MNG)	Proporsi jumlah saham yang dimiliki Direktur, manajer, dan eksekutif lainnya	$\frac{\text{jumlah saham manajemen}}{\text{Total saham}}$
5	Kepemilikan Publik (PUB)	Proporsi jumlah saham yang dimiliki publik	$\frac{\text{jumlah saham publik}}{\text{Total saham}}$
6	Ukuran Dewan Direksi (BOARD)	Jumlah direktur eksekutif dan direktur non eksekutif	<i>Jumlah anggota Direksi</i>
7	Komisaris Independen (IND)	Komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan	$\frac{\text{jumlah komisaris Independen}}{\text{Total saham}}$
8	Komite Audit (CA)	Komite yang terdiri dari dewan direksi yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengawasi manajemen	<i>Jumlah Anggota Komite Audit</i>
9	Ukuran Perusahaan (SZ)	Besarnya nilai aset yang dimiliki perusahaan	<i>Ln aset</i>

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$VOL = \beta_0 + \beta_1 IST + \beta_2 FRG + \beta_3 MNG + \beta_4 PUB + \beta_5 BOARD + \beta_6 IND + \beta_7 CA + \beta_8 SZ + e$$

Keterangan :

B_0 = Konstanta

$\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5; \beta_6; \beta_7; \beta_8$ = Koefisien regresi

Vol = Variabel Dependen

IST; FRG; MNG; PUB; BOARD; IND; CA= Variabel Independen

SZ = Variabel Kontrol

4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berikut ini adalah Statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standart deviasi. Tabel II di bawah dapat diketahui bahwa Variabel INS, FRG, MNG, dan PUB memiliki nilai minimum 0,00 artinya bahwa tidak semua perusahaan yang menjadi sample dalam penelitian ini memiliki saham Institusi, kepemilikan saham asing, dan kepemilikan manajemen. Variabel MNG memiliki Nilai standart deviasi > mean, ini mengindikasikan bahwa data kepemilikan saham manajemen memiliki sebaran yang paling tinggi

Tabel II
Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INS	129	0,00	0,94	0,5622	0,27946
FRG	129	0,00	0,44	0,0609	0,10331
MNG	129	0,00	0,70	0,1185	0,19807
PUB	129	0,00	0,63	0,2319	0,14594
BOARD	129	2	10	3,60	1,492
IND	129	0,25	0,60	0,4074	0,08672
CA	129	3	6	3,10	0,412
VOL	129	0,39	0,91	0,7091	0,09660
SZ	129	3,08	8,87	5,7781	0,89278

Sumber : data sekunder yang diolah

Tabel III di bawah menampilkan hasil uji regresi yang menempatkan variabel pengungkapan sukarela (VOL) sebagai variabel dependen, dan enam variabel sebagai variabel independen, yaitu: Kepemilikan saham Institusi (INS), Kepemilikan saham Asing (FRG), Kepemilikan saham Manajemen (MNG), Kepemilikan saham Publik (PUB), Ukuran Dewan Direksi (BOARD), Komite Audit (CA), dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol,

Tabel III
UJI Regresi

MODEL	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta	t	
<i>(Constant)</i>	0,468	0,113		4,129	0,000
INS	0,071	0,064	0,205	1,104	0,272
FRG	0,167	0,101	0,179	1,651	0,101
MNG	0,066	0,079	0,134	0,824	0,411
PUB	0,042	0,085	0,064	0,498	0,619
BOARD	0,014	0,006	0,223	2,376	0,019
IND	-0,028	0,102	-0,025	-0,276	0,078
CA	0,038	0,023	0,161	1,643	0,103
SZ	-0,005	0,010	-0,045	-0,485	0,629

Sumber : data sekunder yang diolah

Hipotesis H1 memprediksi bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan institusional 0,071 dengan nilai signifikansi 0,272 > 0,05 angka ini menunjukkan bahwa hipotesis ini ditolak, yang artinya bahwa pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi kepemilikan saham institusi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemegang saham institusi lebih mengutamakan analisis kinerja keuangan perusahaan daripada melihat informasi yang disampaikan perusahaan secara sukarela [11]. Atau dengan kata lain Pemegang saham institusional tidak menggunakan informasi sukarela sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan [16]. Hasil pengujian hipotesis H1 ini juga memiliki makna bahwa banyak saham institusional tidak mampu mendorong manajemen untuk membuka informasi tambahan yang dibutuhkan pemegang saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [11, 12, 14].

Hasil pengujian H2 yang memprediksi bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela juga tidak terbukti, hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $0,101 > 0,05$ sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa investor asing juga lebih mengutamakan tingkat pengembalian jangka pendek daripada informasi sukarela [15]. Temuan memiliki makna bahwa banyak investor asing pada perusahaan tidak mampu mendorong manajemen untuk membuka informasi sukarela. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang mengemukakan bahwa kepemilikan asing akan dapat mengurangi asimetri informasi dan mendorong perusahaan lebih transparan [19]. Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [15, 16].

Pengujian Hipotesis H3 yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela tidak terbukti, hal ini bisa dilihat dari hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi $0,411 > 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengungkapan informasi banyak dikendalikan oleh pemilik saham mayoritas [36]. Artinya banyak sedikitnya saham manajerial yang dimiliki tidak akan mempengaruhi peningkatan pada pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini bisa dipahami karena manajemen tidak begitu peduli dengan pengungkapan sukarela, karena manajemen memiliki informasi secara keseluruhan tentang perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [11, 13].

Hasil pengujian Hipotesis H4 yang menyatakan Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela menunjukkan bahwa secara statistik tidak terbukti, hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi $0,619 > 0,05$. Hasil penelitian ini bisa dipahami mengingat rendahnya proporsi kepemilikan publik sehingga tidak mampu menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Disisi lain, masih banyak pemegang saham publik lebih mengutamakan analisis teknikal dalam keputusan investasinya daripada analisis fundamental sehingga pemegang saham tidak terpengaruh dengan pengungkapan sukarela yang diungkapkan [5].

Hipotesis H5 menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela terbukti, hal ini bisa dilihat dari hasil uji statistik nilai signifikansinya $0,019 < 0,05$. Temuan ini membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Mengutip pernyataan bahwa dewan direksi memiliki hubungan langsung dengan pemegang saham sehingga mempengaruhi pengungkapan sukarela [37]. Temuan ini mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa jumlah anggota direksi akan mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kemampuan direksi dalam menentukan tindakan strategis yang diambil [38]. Temuan ini juga mendukung konsep signalling, yang menyatakan bahwa banyaknya dewan direksi akan meningkatkan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh pada ukuran dewan direksi

Hasil pengujian H6 yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, berdasarkan hasil uji statistik tidak terbukti, hal bisa dilihat dari hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansinya lebih besar dari 5% ($0,783 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa komisaris independen lebih fokus pada pengawasan laporan keuangan saja, dan cenderung kurang memperhatikan pada pengungkapan informasi sukarela. Pada umumnya kehadiran komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan yang diwajibkan, dan kurang mempedulikan fungsinya sehingga pemilihan komisaris independen tidak berdasarkan kompetensinya [39]. Menurut konsep keagenan, komisaris independen sebagai pihak yang paling ideal dalam mengawasi manajemen, dan menekan sikap oportunistik, sehingga seharusnya komisaris independen bertanggung jawab, dan memberikan masukan kepada manajemen dalam mengungkapkan informasi yang sesuai dengan keinginan pemegang saham [40]. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela [2, 15].

Hipotesis H7 mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis tersebut ditolak hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 5% ($0,103 > 0,05$), dengan demikian H7 ini ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa komite audit cenderung bekerja normatif, artinya komite ini lebih fokus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat sukarela. Dengan demikian komite audit ini tidak berperan dalam meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil temuan ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang tidak menemukan keterkaitan komite audit dengan pengungkapan sukarela [16].

4 Kesimpulan.

Berdasarkan pada pembahasan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa keterkaitan corporate governance dengan mengungkapkan sukarela, dari tujuh variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan sukarela hanya satu variabel yang terbukti yaitu jumlah dewan direksi, sementara itu kepemilikan asing, kepemilikan instusi, kepemilikan manajemen, kepelikan publik, komisariss independen, dan komite audit, tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa keterkaitan corporate governance yang diproksi dengan struktur kepemilikan dan struktur komisariss sangat redah. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang secara umum menjelaskan bahwa struktur kepemilikan dan struktur dewan komisariss berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga tidak mendukung teori signal yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal.

Keterbatasan dan Rekomendasi.

Penelitian ini hanya mampu membuktikan satu variabel yang sesuai dengan prediksi yang dinyatakan dalam hipotesis, sedangkan enam variabel lainnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diprediksi seperti terlihat dalam hipotesis. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan parameter atau variabel yang lain untuk menguji faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA.

- [1] Purnomo, H., dan Bernawati, Y. (2020). Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Efektivitas Internal Audit dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 861–873.
- [2] Agusti, H. E., dan Oktavianna, R. (2019). Pengaruh Porsi Kepemilikan Publik, Proporsi Dewan Komisariss Independen, dan Ukuran Kap terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 93–103.
- [3] Pontoh, G. T., Arifuddin, A., Mangngalla', M., dan Buleng, A. A. D. L. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Efektivitas Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela. *Accounting Profession Journal*, 3(1), 36–53.
- [4] Neliana, T. (2018). Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 79–98.
- [5] Harventy, G. (2020). The Role Of Corporate Governance Improving Voluntary Disclosure. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 602–613.
- [6] Eng, L. and Mak, Y. (2003) Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325-345
- [7] Donnelly, R., & Mulcahy, M. (2008). Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. *Corporate Governance: An International Review*, 16(5), 416–429.
- [8] Akhtaruddin, M. and Haron, H. (2010), "Board ownership, audit committees' effectiveness and corporate voluntary disclosures", *Asian Review of Accounting*, Vol. 18 No. 1, pp. 68-82
- [9] Albitar, K. (2015) Firm Characteristics, Governance Attributes and Corporate Voluntary Disclosure: A Study of Jordanian Listed Companies. *International Business Research*, 8, 1-10
- [10] Abdul Rauf. 2018. Analisis Pengaruh Diferensiasi, Promosi Dan Positioning Terhadap Keputusan Pembelian. ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580- 9490.Vol.7
- [11] Alnabsha, A., Abdou, H. A., Ntim, C. G., dan Elamer, A. A. (2018). Corporate boards, ownership structures and corporate disclosures: Evidence from a developing country. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(1), 20–41.
- [12] Azzahra, A. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan. *Aliansi: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 115–120. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v13i1.15>
- [13] Elmagrhi, M. H., Ntim, C. G., dan Wang, Y. (2016). Antecedents of voluntary corporate governance disclosure: a post-2007/08 financial crisis evidence from the influential UK Combined Code. *Corporate Governance (Bingley)*, 16(3),
- [14] Maesaroh, H. N. A. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(2), 168–183.

- [15] Serly. (2018). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 2(1), 71–85. <http://repository.uib.ac.id/id/eprint>
- [16] Zedija, K. (2020). Tata Kelola dan Pengungkapan Sukarela Perusahaan Barang Konsumsi Corporate governance and Voluntary Disclosure on Consumer Goods Companies. *Jurnal Universitas International Batam*, 1(1), 151–160.
- [17] Gyapong, E., dan Afrifa, G. A. (2019). The simultaneous disclosure of shareholder and stakeholder corporate governance practices and their antecedents. *International Journal of Finance and Economics*, 24(1), 260–287.
- [18] Hasperi, P., Sri Rahayu, dan Wiralestari. (2020). Analysis of Factors Leverage, Liquidity, Profitability, Company Sizes, Managerial Ownership, and Institutional Ownership That Influences Voluntary Disclosure (Empirical Study of Companies in The Basic Industry And Chemicals, Miscellneus Industry and Con. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 5(1), 59–72.
- [19] Khlif, H., Ahmed, K., dan Souissi, M. (2017). Ownership structure and voluntary disclosure: A synthesis of empirical studies. *Australian Journal of Management*, 42(3), 376–403
- [20] Nainggolan, A. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 1(1), 1–9
- [21] Sarhan, A. A., dan Ntim, C. G. (2019). Corporate boards, shareholding structures and voluntary disclosure in emerging MENA economies. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(1), 2–27
- [22] Wijayani, D. R., Budiman, N. A., dan Mulyani, S. (2019). Pengaruh Corporate Governance terhadap Voluntary Disclosure (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017). *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(4), 45–62
- [23] Yusuf, M. A., Fodio, M. I., dan Nwala, M. N. (2018). Effect of Ownership Structure on Voluntary Disclosure of Listed Financial Firms in Nigeria. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 6(10), 493–515
- [24] Susana Iriyani, 2008, “Penerapan Tata Kelola Usaha”, internet, diakses Rabu, 2April 2008, 12:09
- [25] Hamdani. (2016). *Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis* (Asli). Mitra Wacana Media.Jakarta
- [26] Hidayat, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Pada Laporan Tahunan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 6(1), 151–172
- [27] Alrabba, H. M., Abu Haija, A. A., AlQudah, A. M., dan Azzam, M. J. (2018). The mediating role of foreign ownership in the relationship between board characteristics and voluntary disclosures of Jordanian banks. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(6), 1–16.
- [27] Suwasono, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). *Angewandte Chemie International Edition*, 30(02), 106–126
- [28]. Almilialia, L.S., dan Prayoga, E.B. 2013. “Pengaruh Kepemilikan dan Ukuran perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 14. No.1 (Maret). Hal. 1-19.
- [29] Hakim, Muhammad Lukman;, And Dedik Nur Triyanto. 2019. Analysis Of The Effect Of Public Ownership , Size Of The Board Of Commissioners , Leverage , And Company Size On Disclosure Of Risk Management (An.” *E-Proceeding Of Management* 6(2): 2963–72.
- [30] Saputro, C. and Bambang, S. (2014) ‘Pengaruh struktur kepemilikan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko’, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(2), pp. 1-19.
- [31] Zaheer, N. (2013). Effects of duality , board size and board composition on corporate governance disclosure in Pakistan. *International SAMANM Journal of Finance and Accounting* ISSN 2308-2356 October 2013, Vol. 1, No. 3, 1(3), 1–16.
- [32] Elfeky, M. I. (2017). The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt. *Journal of Finance and Data Science*, 3(1–4), 45–59.

-
- [33] Alfraih, M. M. (2017). The value relevance of intellectual capital disclosure: empirical evidence from Kuwait. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25,1
- [34] Maram Muneer Al Maskati & Allam Mohammed Mousa Hamdan, 2017. "Corporate governance and voluntary disclosure: evidence from Bahrain," *International Journal of Economics and Accounting*, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 8(1), pages 1-28.
- [35] Chakroun, R. (2013), "Family control, Board of Directors' independence and extent of voluntary disclosure in the annual reports: case of Tunisian Companies", *Journal of Business Studies Quarterly*, Vol. 5 No. 1, pp. 22-34
- [36] Purwaningsih, E., dan Wibowo, M. N. K. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan, dan Kesulitan Keuangan terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Media Akuntansi*, 32(01), 1–18.
- [37] Ivone, dan Chandra, B. (2021). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Keluarga. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 322–334.
- [38] Sumantri, dan Mardianto. (2018). Mekanisme Tata Kelola dan Perencanaan Suksesi terhadap Kinerja Perusahaan Keluarga yang Dikendalikan Anggota Keluarga dan Bukan Anggota Keluarga di Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*,
- [39]] Fatmawati, R., Astuti, D. W., dan Suhardjanto, D. (2018). Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Voluntary Disclosure. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 57–69
- [40] Birawanto, M. F. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(1), 1–17.